

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	133
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja.....	16
2.3.2 Permasalahan	16
2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi.....	17
II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	1919
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
III.3 Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	28
BAB V PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel T.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan) Satpol PP Kota Pekalongan	7
Tabel T.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan	15
Tabel T.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Satpol PP Kota Pekalongan	18
Tabel T.10	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Satpol PP Kota Pekalongan	23

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2019 disusun dengan mengacu

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis SATPOL PP Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan SATPOL PP Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2019 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban SATPOL PP Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

- II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program/kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2019, diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2019. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dimkasu dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (tahun 2019) Satpol PP dapat disajikan dalam tabel T-7 sebagai berikut :

Tabel T-7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan) SATPOL PP Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100%					100%		100
1.10.50.01.001	Penyediaan jasa surat menyerurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyerurat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	350 org/kali	250 org/kali	80 org/kali	104 org/kali	130	350 org/kali	192	100
1105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100%					100%		100
1.10.50.02.003	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit		
1.10.50.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1	100
1.10.50.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7 / 6)	Target Renja PD tahun 2019 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100	32 unit	32	100
1.10.50.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100	25 unit	90	100
1.10.50.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1105.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran aparatur	90%					90%		100
1.10.50.03.002	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	140 stel	140 stel	140 stel	140 stel	100	2384 stel	2380	100
1105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%					100%		100
1.10.50.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	6 dokumen	6	100
1.10.50.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	6 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	6 dokumen	6	100
1.10.50.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1105.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Persentase pengaduan	0	0	0	0	0	0%	0	0
1.10.50.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	jumlah tenaga kontrak yang ada	0	1 org	-	-	-	1 org	1	100
1.10.50.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Keterbukaan Informasi Publik, dan Karnaval Batik	3 kali	2 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali		100
1105.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan angka kriminalitas (kasus)	0%	0	0	0	0	0%	0	0
1.10.50.16.001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jml. Pelaksanaan keg. Upacara peringatan HUT Pol PP, Jmabore, Forkonkom, Pelatihan Fisik dan Pelatihan PHH	8 kegiatan	8	8	8	100	13 kegiatan	13	100
1.10.50.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi	2 kali	1 kali	2 kali	0 kali	0	-	-	100
1105.24	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	-	-	-	-	-	100	100	100
1.10.50.24.001	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Jml. Razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	48 razia	48 razia	48 razia	48 razia	100	48 razia	48 razia	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1105.25	Program Pelayanan Kedaruratan Sipil	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	-	-	-	-	-	100	100	100
		Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	-	-	-	-	-	100	100	100
1.10.50.25.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jml. Keg. Pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan operasional linmas	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	100	47 kegiatan	47	100
		Jumlah kegiatan PAM piket rumah dinas	-	-	-	-	-	270 kali	270	100
		Jumlah hari piket posko PBA	-	-	-	-	-	90 hari	90	100
1.10.50.25.002	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sarasehan kantrantibmas dan KST dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	90 kegiatan	71	78.89
1.10.50.25.003	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	25 kejadian	25 kejadian	25 kejadian	25 kejadian	100	25 kejadian	49	196
1.10.50.25.004	Pengamanan pemilihan umum	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilihan presiden dan legislatoif yang kondusif, aman dan tertib	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	100	6 bulan	6	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1105.26	Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	-	-	-	-	-	100	98,24	87,24
1.10.50.26.001	Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda dan perwal di wilayah Kota Pekalongan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi pekat, PGOT, reklame dan sarasehan serta pengumpulan data dan informasi	-	-	-	-	-	252 kali	252	100

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada SATPOL PP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis SATPOL PP Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2018, realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

➤ *Analisis Sasaran : Meningkatkan penegakan Perda*

Analisis Pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2018
1	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	%	100	94	94
2	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk (peleton inti, linmas kec dank el)	Indeks	59,6	50,13	84
3	Jumlah temuan tembakau atau rokok illegal (bungkus rokok pertahun)	Bungkus	800	1362	100
TOTAL PERSENTASE					92

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 92% atau dikategorikan baik, meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Kendala dalam mencapai target yang direncanakan sebesar 100% tersebut adalah karena kurangnya dukungan jumlah personil Linmas yang ada di Kota Pekalongan dan dalam proses penanganan laporan pelanggaran perda sering terjadi pelanggaran kabur.

➤ **Sasaran : Menurunnya kasus kebakaran karena human error**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2018
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	97	97
2	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai SPM	%	100	100	100
3	Anggota damkar yang terlatih	%	50	50	100
TOTAL PERSENTASE					99

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 99% atau dikategorikan baik, meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Kendala dalam mencapai target yang direncanakan sebesar 100% tersebut adalah karena kurangnya dukungan jumlah personil damkar yang ada di Kota Pekalongan dan dalam proses penanganan laporan bahaya kebakaran terdapat lokasi yang sulit dijangkau, alamat tidak jelas, dan perbaikan jalan ke lokasi. Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T.8 sebagai berikut:

Tabel T.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tw.II Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penyelesaian pelanggaran perda			100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	
2	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk (peleton inti, linmas kec dank el)			59,6	59,6	59,6	59,6	50,13	50,13	59,6	59,6	
3	Jumlah temuan tembakau atau rokok illegal (bungkus rokok pertahun)			800	500	350	150	1362	260	350	150	
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran			100	100	100	100	97	100	100	100	
5	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Anggota damkar yang terlatih			50	50	50	50	50	50	50	50	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Pekalongan, SATPOL PP Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut, SATPOL PP Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat” dengan Tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI”.

Dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI”, sasaran “Meningkatnya Penegakan Perda”, dengan Indikator Kinerja “Persentase Penegakan Perda”. Capaian Indikator Kinerja tersebut pada tahun 2018 sebesar 94%.

2.3.2 Permasalahan

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (SATPOL PP, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai).

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Menjaga ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini SATPOL PP Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik SATPOL PP Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”.

II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Akan tetapi pada Musrenbang Kota, Belum ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-9 sebagaimana terlampir.

Tabel T.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 SATPOL PP Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini Satpol PP berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Satpol PP menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
- f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
- j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran SATPOL PP Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. a. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
 a. Sasaran : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas Penegakan Perda
2. a. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 b. Sasaran : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran SATPOL PP Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah		1. persentase kawasan patuh perda	100%
		a. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	a. Berkurangnya pelanggaran Perda b. Waktu respon penanganan kebakaran	1000 kasus 15 menit
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	72
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a. Nilai Evaluasi AKIP	70

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
		b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	850

III.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2019 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2019. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 program dan 31 kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 11.414.220.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada tabel T.11 sebagai berikut :

Tabel T.11 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 SATPOL PP Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.414.220.000		
1105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.414.220.000		
1105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Pekalongan	100 persen	407.600.000	DAU	
1105.110502.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	12 bulan	2.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 bulan	112.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Pekalongan	12 bulan	51.600.000	DAU	
1105.110502.00.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Kota Pekalongan	12 bulan	17.500.000	DAU	
1105.110502.00.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU	
1105.110502.00.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110502.00.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	DAU	
1105.110502.00.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekalongan	12 bulan	130.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kota Pekalongan	250 org/kali	90.000.000	DAU	
1105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Kota Pekalongan	100 persen	2.547.658.000	DAU	
1105.110502.00.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	1 unit	1.890.000.000	DAU	
1105.110502.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	33 unit	457.658.000	DAU	
1105.110502.00.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekalongan	3 unit	180.000.000	DAU	
1105.110502.00.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	20.000.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1 : Persentase kehadiran aparatur	Kota Pekalongan	90 persen	260.275.000	DAU	
1105.110501.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Kota Pekalongan	145 stel	260.275.000	DAU	
1105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kota Pekalongan	100 persen	48.000.000	DAU	
1105.110502.00.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	Kota Pekalongan	6 dokumen	8.000.000	DAU	
1105.110502.00.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Kota Pekalongan	6 dokumen	8.000.000	DAU	
1105.110501.06.007	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil bidang tibum dan linmas yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	10.500.000	DAU	
1105.110502.00.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	12 bulan	20.000.000	DAU	
1105.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	1 : Pengaduan yang diterima	Kota Pekalongan	0 persen	78.280.000	DAU	
1105.110501.15.004	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	2 org/bulan	63.280.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110502.00.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Haktekas, Keterbukaan Informasi Publik, dan Karnaval Batik	Kota Pekalongan	3 kali	15.000.000	DAU	
1105.28	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Cakupan kelompok sasaran tibum yang dibina	Kota Pekalongan	50%	936.555.000	DAU	
1105.110501.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah kegiatan upacara HUT Pol PP, Jmabore, Pelatihan SDM dan Pelatihan Penanggulangan Huru-Hara yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	6 kegiatan	178.285.000	DAU	
1105.110501.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan sarasehan tibumtranmas, PAM Insidental dan Operasi KST yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	145 kegiatan	343.485.000	DAU	
1105.110501.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan bintek tibum tranmas, bintek perundang-undangan dan kesamaptaan evaluasi banpol yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	3 kegiatan	65.000.000	DAU	
1105.24	Program pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	1. Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	Kota Pekalongan	100%	140.000.000	DAU	
1105.110501.24.001	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Kota Pekalongan	48 Razia	140.000.000	DAU	
1105.25	Program pelayanan kedaruratan sipil	1. Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran 2. Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	Kota Pekalongan	100% 100%	3.131.438.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110501.25.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas - Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan - Jumlah hari piket posko bencana alam (PBA) yang dilaksanakan 	Kota Pekalongan	44 kegiatan 180 hari 60 hari	801.890.000	DAU	
1105.110501.25.003	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani	Kota Pekalongan	25 kejadian	958.860.000	DAU	
1105.110501.25.004	Pengamanan Pemilihan Umum	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif yang kondusif, aman dan tertib	Kota Pekalongan	6 bulan	1.370.688.000	DAU	
1105.26	Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah	1. Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Kota Pekalongan	100%	3.864.414.000	DAU	
1105.110501.26.001	Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi pekat, PGOT, reklame, dan sarasehan serta pengumpulan data dan informasi	Kota Pekalongan	252 kali	3.740.814.000	DAU	
1105.110501.26.002	Pengembangan sistem informasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				123.600.000	DAU	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan SATPOL PP Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama SATPOL PP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Pelayanan Kedaruratan Sipil
3. Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab SATPOL PP Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2019 terdapat 10 Program dan 31 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan SATPOL PP Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).